

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

¹ Suci Ramadhani, ² Roni Ekha Putera

^{1,2}Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Correspondence author: ichyramadhani85@gmail.com

Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the effect of HR competencies and information technology on the quality of the Minimum Service Standards (MSS) report moderated by organizational commitment among Payakumbuh City Government employees in West Sumatra. A quantitative approach with hypothesis-testing techniques was used in this study. There were 35 samples with the purposive sampling technique, namely officials and employees who were directly involved in the preparation of the SPM Report, namely the Head of SKPD, PPK, and Subag Program. Data was collected by distributing questionnaires in the form of questionnaires and processed using SmartPLS 3.0 software. The data analysis method uses structural equation modeling. The results showed that HR competence had a positive but insignificant effect on the quality of SPM reports, information technology had a positive but insignificant effect on the quality of SPM reports, and organizational commitment had a positive and significant effect on the quality of SPM reports. Organizational commitment was unable to moderate the relationship between HR competence and information technology with the quality of SPM reports. The research implications emphasize the importance of maximizing HR competencies, information technology, and employee commitment when working so as to improve performance.

Keywords: *HR Competence; Information Technology; Organizational Commitment; SPM Report Quality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi SDM dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi pada pegawai Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendekatan kuantitatif dengan teknik pengujian hipotesis digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 35 sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan SPM yakni Kepala SKPD, PPK dan Subag Program. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner berupa angket dan diolah menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Metode analisis data menggunakan *Structural Equation Modelling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan SPM, teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan SPM, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan SPM, komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan teknologi informasi dengan kualitas laporan SPM. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya memaksimalkan kompetensi SDM, teknologi informasi dan komitmen pegawai saat bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Kata Kunci: *Komitmen Organisasi; Kompetensi SDM; Kualitas Laporan SPM; Teknologi Informasi*

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Salah Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bagian dari urusan pemerintahan yang esensial, khususnya dalam aspek pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 18 mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan prioritas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar. Implementasi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan tersebut harus mengikuti Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang membahas tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk warga negara secara minimal. Pelayanan dasar ini mencakup pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur mengenai jenis layanan dan indikator yang berlaku untuk setiap urusan.

Ruang lingkup standar pelayanan dasar mencakup enam urusan wajib, yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Infrastruktur dan Tata Ruang, 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial, dan 6) Kesejahteraan Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. Semua jenis layanan dasar yang ada pada masing-masing perangkat daerah harus dilaksanakan sesuai dengan indikatornya. Pemerintah, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban untuk mempublikasikan Standar Pelayanan Minimal yang mesti diterima oleh Warga Negara. Oleh karena itu, informasi yang dipublikasikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para pengguna informasi. Informasi dianggap bermanfaat ketika dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan oleh pengguna informasi (Manik, 2021).

Dalam rangka menghasilkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus dapat memenuhi dan mengisi semua menu yang ada dalam Aplikasi e-SPM dari Kementerian Dalam Negeri, begitupun dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Apabila informasi Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak sesuai maka bisa berdampak pada kesalahan dalam melakukan analisa dan mengambil keputusan. Kesalahan ini pada akhirnya dapat menimbulkan kurang efektifnya pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian terhadap kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat antara lain dari tingkat capaian dan penilaian dari Pemerintah Pusat yakni melalui laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Nilai yang tinggi ini tidak menjamin bahwa Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah sempurna. Masih ditemui kondisi yang menunjukkan kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi terutama dari sisi pengisian form dan pemahaman stakeholder terhadap capaian tiap jenis layanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari sebagian unsur masyarakat mengenai kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Payakumbuh.

Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat relevansi dan keandalan dari laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya yaitu komitmen organisasi, teknologi informasi, dan kompetensi SDM yang dimiliki pada suatu instansi pemerintahan. Semakin kompeten Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola laporan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kualitas informasi Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disajikan dalam laporan Daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ilmiddaviq (2022) bahwa sumber daya manusia yang kompeten dibutuhkan terkait dengan kualitas laporan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, masih ditemukan Subbag Program yang belum memahami pengisian aplikasi dan pejabat teknis yang tidak memahami cara pengisian aplikasi tersebut.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Telah banyak diketahui tentang manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi, antara lain adalah kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah dan kemampuan *multiprocessing* (Pebriani, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan

perhitungannya juga akan memilih tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Shofa et al., 2022).

Pada saat ini, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan regulasi. Dalam pelaksanaannya, masih ditemui kendala terutama dalam melakukan penyesuaian terhadap perangkat lunak, pemutakhiran data, sumber daya manusia IT yang ada. Kondisi ini dapat mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disamping itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah komitmen organisasi. Dengan komitmen yang dimiliki oleh masing-masing individu pada organisasi, bisa mempengaruhi kinerja dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Temuan oleh Manimpurung et al. (2018) bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan.

Penelitian mengenai kompetensi SDM, teknologi informasi dan komitmen organisasi serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan pemerintah daerah, telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan membuktikan komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi akuntansi, komitmen, dan mutasi PPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang (Lubis & Saripudin, 2017; Mahlil & Yahya, 2017; Suwarno et al., 2023). Berbeda dengan Yeny et al. (2016) yang menemukan bahwa faktor komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yeny et al. (2016), Suwarno et al. (2023) dan Sasneti (2022) menemukan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan temuan oleh Siwambudi et al. (2017) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Hadis et al. (2022) menemukan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Hal ini bertolak belakang dengan temuan lain oleh Aprsiansyah et al. (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Riyanto (2022) menemukan bahwa kompetensi SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

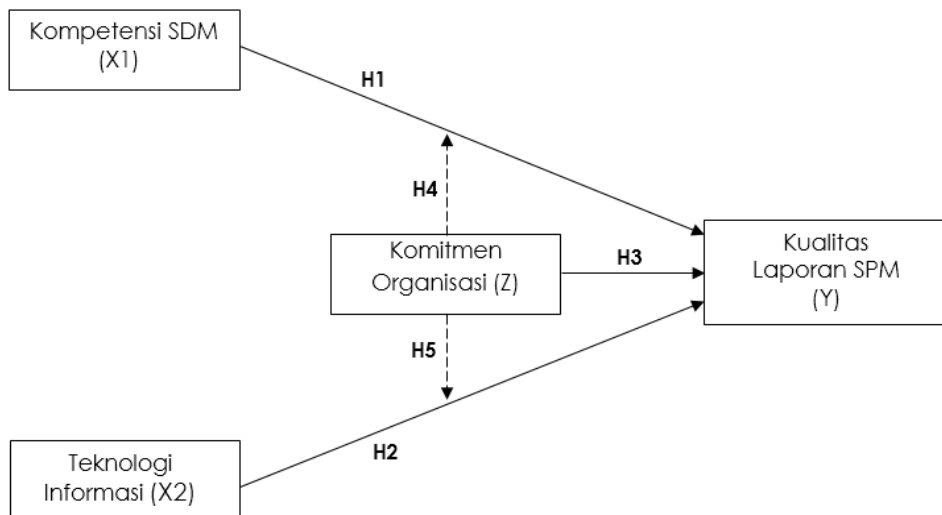
Berdasarkan perbedaan temuan penelitian terdahulu diatas dan masing sedikitnya literatur yang membahas peran moderasi komitmen organisasi pada pengaruh kompetensi SDM dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui penelitian ini.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan uji hipotesis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner berupa angket kepada responden. Struktur kuisisioner didasarkan pada skala Likert lima poin, yang memungkinkan responden untuk menentukan keputusan: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Sampel yang diambil berjumlah 35 orang dengan teknik *purposive sampling* yaitu pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan SPM yakni Kepala SKPD, PPK dan Subag Program pada pemerintah Kota Payakumbuh.

Teknik penelitian menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan software SmartPLS 3.0. Pengujian yang dilakukan meliputi uji *outer model* (uji validitas dan uji reliabilitas) dan uji *inner model* (*r-square* dan uji hipotesis).

Berikut adalah kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

H1: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

H2: Teknologi nformasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

H3: Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

H4: Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kompetensi SDM dengan kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

H5: Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Terdapat 35 orang responden dalam penelitian ini. Penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebesar 54,3%, sedangkan perempuan sebanyak 45,7%. Lalu, status karyawan diperoleh bahwa semuanya adalah PNS dengan persentase 100%. Kemudian, mayoritas pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah S1, yaitu sebanyak 48,5%, kemudian DIII sebanyak 25,7%, S2 sebanyak 17,1%, serta sisanya 8,7% merupakan tamatan SMA. Berikut disajikan tabel karakteristik responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (N=35)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	19	54,3
Perempuan	16	45,7
Status Pekerjaan		
PNS	35	100
Pendidikan Terakhir		
SMA	3	8,7
DIII	9	25,7
S1	17	48,5
S2	6	17,1

Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tingkat validitas indikator diukur dengan menggunakan nilai *outer loading* > 0,7. Nilai AVE > 0,5. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* > 0,7 dan nilai *cronbach's alpha* > 0,6. Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas *Before Dropping*

Variabel	Item	Validitas		Reliabilitas	
		OL	AVE	CA	CR
Kompetensi SDM	SDM1	0,543	0,528	0,866	0,897
	SDM2	0,810			
	SDM3	0,836			
	SDM4	0,775			
	SDM5	0,763			
	SDM6	0,762			
	SDM7	0,506			
	SDM8	0,744			
Teknologi Informasi	TI1	0,693	0,431	0,592	0,693
	TI2	0,912			

	TI3	0,717			
	TI4	-0,566			
	TI5	0,475			
	TI6	-0,379			
	TI7	0,771			
	TI8	0,583			
	KO1	0,568			
	KO2	0,789			
	KO3	0,607			
	KO4	0,689			
	KO5	0,646			
Komitmen Organisasi	KO6	0,685	0,480	0,895	0,909
	KO7	0,882			
	KO8	0,816			
	KO9	0,605			
	KO10	0,623			
	KO11	0,640			
	KL1	0,296			
	KL2	0,472			
	KL3	0,673			
	KL4	0,579			
	KL5	0,796			
	KL6	0,682			
Kualitas Laporan SPM	KL7	0,730	0,447	0,902	0,916
	KL8	0,716			
	KL9	0,785			
	KL10	0,747			
	KL11	0,613			
	KL12	0,586			
	KL13	0,784			
	KL14	0,714			

Sumber: Olah Data SmartPLS 3.0 (2024)

Ctt: OL = *outer loading*, AVE = *average variance extracted*, CA = *cronbach's alpha*, CR = *composite reliability*.

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada outer loading masih terdapat nilai yang berada dibawah syarat ambang batas dan nilai AVE pada variabel masih ada yang bernilai dibawah 0.5. Maka dari itu, perlu adanya eliminasi pada indikator yang masih di bawah 0.7. Berikut hasil setelah dilakukan eliminasi (*dropping*).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas *After Dropping*

Variabel	Item	Validitas		Reliabilitas	
		OL	AVE	CA	CR
Kompetensi SDM	SDM2	0,758			
	SDM3	0,817			
	SDM4	0,886	0,709	0,897	0,924
	SDM5	0,879			
	SDM6	0,864			

	TI2	0,915			
Teknologi Informasi	TI3	0,830	0,741	0,827	0,895
	TI7	0,834			
	KO2	0,894			
Komitmen Organisasi	KO7	0,875	0,774	0,856	0,911
	KO8	0,869			
	KL5	0,820			
Kualitas Laporan SPM	KL7	0,793			
	KL8	0,766	0,630	0,884	0,911
	KL9	0,760			
	KL13	0,854			
	KL14	0,764			

Sumber: Olah Data SmartPLS 3.0 (2024)

Ctt: OL = outer loading, AVE = average variance extracted, CA = cronbach's alpha, CR = composite reliability.

Berdasarkan hasil *outer loadings* pada tabel diatas, nilai semua item/indikator pada setiap variabel sudah lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE pada semua variabel juga sudah diatas 0,5. Oleh karena itu, semua item tersebut dapat dikatakan valid. Kemudian, nilai *cronbach's alpha* pada keempat variabel sudah lebih besar dari 0,6 dan nilai *composite reliability* pada keempat variabel juga sudah lebih besar dari 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai reliabilitas yang baik.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel berikut ini.

Table 4. Hasil Uji Hipotesis

H	Hubungan	OS	P-Values	Kesimpulan
H1	KSDM->KLSPM	0,164	0,461	Tidak Didukung
H2	TI->KLSPM	0,306	0,222	Tidak Didukung
H3	KO->KLSPM	0,224	0,002	Didukung
H4	KSDM->KLSPM*KO	-0,183	0,432	Tidak Didukung
H5	TI->KLSPM*KO	0,445	0,087	Tidak Didukung

Sumber: Olah Data SmartPLS 3.0 (2024)

Ctt: H = hipotesis, OS = *original sample*.

Nilai *original sample* untuk hipotesis 1,2,3, dan 5 berlambang plus sehingga hubungannya positif. Namun, nilai *original sample* untuk hipotesis 4 berlambang minus sehingga hubungannya negatif. Kemudian, nilai *p-value* menunjukkan signifikansi hubungan antar variabel. Berdasarkan data pada tabel diatas, hipotesis 1,2,4, dan 5 tidak didukung karena nilai *p-value* > 0,05 dan hanya hipotesis 3 yang didukung karena nilai *p-value* < 0,05.

Pembahasan

a. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Hasil pengujian menunjukkan hubungan kompetensi SDM dengan kualitas laporan SPM mempunyai nilai koefisien jalur dengan tanda positif sebesar 0,164. Nilai *p-value* sebesar 0,461 yang berarti hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan karena nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan SPM pada pegawai di Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) tidak didukung.

Hasil ini kemungkinan disebabkan karena tingkat kompetensi yang dimiliki di bidang keuangan pada SKPD Kota Payakumbuh sudah baik. Sementara dalam proses penyusunan laporan keuangan pada SKPD Agam telah didukung dengan teknologi informasi yang berfungsi untuk membuat laporan keuangan sehingga pegawai keuangan di SKPD Agam yang bertugas membuat laporan keuangan tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bidang akuntansi karena proses akuntansi seluruhnya telah dikerjakan oleh sistem yang diterapkan melalui aplikasi keuangan yang digunakan. Pegawai SKPD Agam dalam hal ini hanya menginput data saja. Dengan adanya aplikasi ini, menyebabkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan tanggungjawab SKPD sebagai entitas akuntansi tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai, karena telah dibantu oleh aplikasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Siwambudi et al. (2017) bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Alminanda dan Marfuah (2018) menemukan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Kemudian, Sanjaya et al. (2017) juga menemukan bahwa menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

b. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Hasil pengujian menunjukkan hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan SPM mempunyai nilai koefisien jalur dengan tanda positif sebesar 0,306. Nilai *p-value* sebesar 0,222 yang berarti hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan karena nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan SPM pada pegawai di Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) tidak didukung.

Penerapan teknologi informasi yang optimal akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih akurat dan lebih cepat karena melalui teknologi informasi, dapat

mengurangi kesalahan yang bersifat material dan dapat mengemat waktu pengerjaannya. Namun, dari hasil jawaban responden belum sepenuhnya teknologi informasi yang digunakan telah termanfaatkan dengan baik seperti pada jumlah unit komputer yang belum cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas. Instansi juga masih kurang fokus dalam hal pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan yang digunakan secara teratur dan tepat waktu. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dihasilkan, karena akan menimbulkan keterlambatan atau kesalahan dalam proses penyusunan dan pencatatan. Dengan pemeliharaan yang tidak teratur serta perbaikan yang kurang tepat waktu juga dapat menimbulkan gangguan pada komputer atau sistem yang digunakan dan akan menghambat proses pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setyowati et al. (2016) dimana teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sundari dan Rahayu (2019) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian Sikumbang et al. (2020) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Hasil pengujian menunjukkan hubungan komitmen organisasi dengan kualitas laporan SPM mempunyai nilai koefisien jalur dengan tanda positif sebesar 0,224. Nilai *p-value* sebesar 0,002 yang berarti hubungan antar variabel tersebut signifikan karena nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan SPM pada pegawai di Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) didukung.

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan (Mahestu & Tantawi, 2023). Hasil penelitian Endianto et al. (2017) juga menunjukkan bahwa efektivitas standar akuntansi pemerintah, peran internal audit, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bangli.

d. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Hasil pengujian menunjukkan hubungan kompetensi SDM dengan kualitas laporan SPM yang dimoderasi oleh komitmen organisasi mempunyai nilai koefisien jalur dengan tanda negatif sebesar -0,183. Nilai *p-value* sebesar 0,432 yang berarti hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan karena nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara negatif dan memperlemah hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan SPM pada pegawai di Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) tidak didukung.

Interaksi antara komitmen organisasi dengan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemungkinan juga disebabkan karena kurangnya penghargaan (reward) bagi pegawai yang berprestasi, promosi jabatan tidak sesuai dengan ketentuan, penghasilan yang diterima tidak sesuai beban kerja, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif untuk menunjang pegawai dalam bekerja sehingga kemampuan yang dimiliki pegawai tidak digunakan secara maksimal (Siwambudi et al., 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Sanjaya et al. (2017) dimana interaksi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dengan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa Komitmen Organisasi yang tinggi atau rendah tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Siwambudi et al. (2017) menyatakan bahwa interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung

e. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi

Hasil pengujian menunjukkan hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan SPM yang dimoderasi oleh komitmen organisasi mempunyai nilai koefisien jalur dengan tanda positif sebesar 0,445. Nilai *p-value* sebesar 0,087 yang berarti hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan karena nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara positif dan belum mampu secara maksimal meningkatkan hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan SPM pada pegawai di Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) tidak didukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Made (2020) bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengendalian intern, tetapi tidak mampu memperkuat kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan. Kemudian, Andrianto dan Rahmawati (2018) juga menemukan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan teknologi informasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan SPM pada pegawai Pemerintah Kota Payakumbuh. Sebaliknya, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan SPM. Namun, komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dan teknologi informasi dengan kualitas laporan SPM. Penelitian ini menekankan pentingnya memaksimalkan kompetensi SDM, teknologi informasi, dan komitmen pegawai untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja di Pemerintah Kota Payakumbuh. Untuk penelitian di masa mendatang, dapat menggunakan objek penelitian yang cakupan populasinya lebih besar. Selain itu, metode campuran (*mix method*) juga dapat digunakan agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117-132.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Apsriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44-62.
- Endianto, M., Herawati, N. T., Ak, S. E., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Hadis, F., Ihsan, H., Dwiharyadi, A., Septriani, Y., & Afni, Z. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 106-121.
- Ilmiddaviq, M.B. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Lean

Management di CV Aji Soko Abadi. *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 5(2), 300-310.

Lubis, I. & S. (2017). Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Komitmen dan Mutasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Komitmen Pimpinan Sebagai Moderating. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 8(2), 230-244.

Made Indra Satriawan, G. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Badan dan Dinas Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Mahestu, Y., & Tantawi, R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(1), 13-23.

Mahlil, M., & Yahya, M.R. (2017). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 21-29.

Manik, T.L. (2021). Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karir Pada Siswa Kelas XII SMK Multi Karya Medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).

Pebriani, R.A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(1), 55-62.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang jenis dan indikator layanan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang jenis dan mutu pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang membahas tentang Standar Pelayanan Minimal.

Riyanto, D.Z. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (Studi Kasus Pada BPKP Jawa Tengah). *EBISTEK: Ekonomika, Bisnis dan Teknologi*, 3(1).

Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Ka (Doctoral dissertation, Riau University).

Sasneti. (2022). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 15505-15513.

Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191.

Shofa, A., Wafirotin, K.Z., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Madiun). *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 128-144.

Sikumbang, M., Pakaya, L., & Blongkod, H. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas SDM, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada OPD Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 1(1), 36-47.

Siwambudi, I.G.N., Yasa, G.W., & Badera, I.D.N. (2017). Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sdm dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 385-416.

Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).

Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Empiris Kecamatan Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 165-174.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 11 ayat 3, Pasal 18

Yeny, Y., Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).